

MITIGASI BENCANA PADA SEKTOR PENDIDIKAN FORMAL

13

Fieka Nurul Arifa

Abstrak

Mitigasi bencana harus segera diwujudkan mengingat wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman bencana yang bisa terjadi kapan saja. Banyaknya korban jiwa menunjukkan bahwa mitigasi masih lemah. Tulisan ini menjelaskan mengenai mitigasi bencana pada pendidikan formal. Mitigasi bencana salah satunya dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap tanggap dalam upaya mengurangi risiko bencana. Mitigasi bencana pada pendidikan formal dapat dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Materi mitigasi meliputi edukasi kebencanaan serta simulasi tanggap bencana. Dalam pelaksanaannya, saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dan hambatan baik dari segi kurikulum, peran lembaga, SDM, maupun sarana dan prasarana. Dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat dan sektor negara untuk mendukung implementasi mitigasi bencana pada pendidikan. DPR RI memiliki peran penting baik dalam hal legislasi maupun pengawasan yakni menjembatani koordinasi berbagai lembaga terkait kebijakan penyelenggaraan mitigasi bencana melalui pendidikan formal serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan mitigasi bencana pada pendidikan formal dapat terselenggara secara berkesinambungan.

Pendahuluan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, klimatologis, dan demografis yang berpotensi terhadap terjadinya berbagai bencana alam. Sekitar 90 persen bencana di dunia bahkan bisa terjadi di Indonesia (*Kompas*, 12 Oktober 2018). Lebih dari satu dekade terakhir, rangkaian bencana besar terus terjadi di Indonesia, diawali bencana tsunami di

Aceh pada tahun 2004 yang menelan korban jiwa lebih dari 150.000 orang. Tahun ini, bencana besar berupa gempa bumi terjadi di Lombok pada 29 Juli 2018 dengan magnitudo 7 SR yang menelan korban jiwa sebanyak 555 orang; gempa di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 dengan magnitudo 7,4 SR yang menelan korban jiwa sebanyak 2.073 orang; serta gempa di Situbondo, Jawa Timur pada 11



Oktober 2018 dengan magnitudo 6,4 SR yang menelan korban jiwa sebanyak 3 orang (*Kompas*, 12 Oktober 2018).

Banyaknya korban jiwa pada rangkaian gempa selama ini menunjukkan bahwa mitigasi menghadapi bencana masih lemah. Para ahli gempa dan tsunami dari sejumlah negara menyerukan agar Indonesia belajar dari bencana yang telah berulang terjadi dan menelan korban hingga ribuan jiwa (*Kompas*, 13 oktober 2018). Hal ini menjadi ironis karena pada tahun 2005, Indonesia termasuk dalam 168 negara yang meratifikasi *Hyogo Framework for Action* (HFA). HFA berkomitmen menurunkan hilangnya nyawa, aset sosial, ekonomi dan lingkungan karena bencana. Salah satu prioritas HFA adalah menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan di semua tingkat atau jenjang (ISDR, 2005: 18). Dengan demikian, penanggulangan bencana melalui pendidikan kebencanaan dan mitigasi untuk mengurangi risiko seharusnya menjadi arus utama pembangunan. Sektor pendidikan formal dianggap sebagai upaya penanggulangan yang paling efektif untuk mengurangi dampak risiko bencana. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana pada pendidikan formal melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tanggap dalam upaya mengurangi risiko bencana.

Mitigasi Bencana dari Perspektif Pendidikan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam rangka mitigasi bencana, diperlukan kesadaran semua pihak dan juga aksi yang bersifat holistik dalam rangka meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana.

Salah satu bagian penting dalam mitigasi bencana adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan berperan menguatkan pengetahuan kebencanaan, sebagaimana diprioritaskan dalam HFA (ISDR, 2005: 18). Hal ini bisa juga diartikan bahwa sekolah atau institusi pendidikan berperan dalam mendukung program mitigasi bencana nasional. Sekolah dianggap sebagai lembaga yang efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, yaitu melalui penyediaan edukasi mengenai mitigasi bencana (Rahma, 2018: 3). Dengan demikian, diharapkan ketika terjadi bencana, masyarakat tidak bingung dan panik karena telah memahami bagaimana cara mengurangi risiko bencana.

Mitigasi bencana pada pendidikan formal salah satunya dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam upaya mengurangi risiko bencana. Melalui sektor pendidikan, maka pengetahuan tentang mitigasi bencana dapat diberikan secara intensif oleh pendidik (Rizaldy, 2018: 481). Mitigasi bencana yang dilakukan dalam tataran pendidikan di sekolah meliputi kegiatan edukasi mengenai kebencanaan serta melakukan pelatihan gladi (simulasi) secara berkesinambungan.

Implementasi Mitigasi Bencana Pada Sektor Pendidikan Formal

Pendidikan mitigasi bencana merupakan kebutuhan esensial guna mengurangi dampak bencana alam

baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Dalam kaitannya dengan implementasi pendidikan mitigasi bencana di sekolah, upaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menyisipkan materi mitigasi bencana pada mata pelajaran tertentu dan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah tersebut (Rizaldy, 2018: 482). Dengan begitu, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana sehingga saat terjadi bencana, jumlah korban jiwa dapat diminimalisir.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, mitigasi bencana melalui pendidikan formal di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan. Belum adanya kebijakan nasional di bidang pendidikan tentang penanggulangan bencana berakibat pada kurang siapnya sekolah atau institusi pendidikan menyelenggarakan mitigasi bencana di sekolah (Rahma, 2018: 5). Hanya beberapa provinsi saja yang sudah memiliki kebijakan penanggulangan bencana dalam bentuk peraturan daerah, tetapi pelaksanaannya juga masih belum serius.

Hingga saat ini, pendidikan mitigasi bencana pada kegiatan pembelajaran di sekolah belum banyak dilakukan. Materi kebencanaan masih sedikit dipelajari di sekolah. Hal tersebut disebabkan karena belum terintegrasinya pendidikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan, baik secara intrakurikuler melalui pembelajaran di kelas maupun pada kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan intrakurikuler, selain belum ada mata pelajaran khusus mengenai mitigasi bencana di sekolah, penyisipan materi dalam berbagai mata pelajaran pada kurikulum 2013 juga masih sangat terbatas. Selain itu, kegiatan

ekstrakurikuler yang memuat mitigasi bencana juga belum menjadi kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa.

Hambatan lain yang dihadapi dalam implementasi pendidikan mitigasi bencana di sekolah adalah keterbatasan SDM yang menguasai mitigasi bencana, seperti kurangnya pemahaman guru mengenai bencana, kurangnya kapasitas guru dalam mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam kurikulum, dan minimnya panduan kebencanaan yang dapat diakses guru. Selain itu, minimnya keterlibatan lembaga dan komunitas sekolah, serta tidak mendukungnya kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana juga menjadi hambatan tersendiri.

Usulan Mitigasi Bencana Pada Pendidikan Formal

Sekolah merupakan lembaga tempat berbagi pengetahuan dan keterampilan, sehingga harapan bahwa sekolah menjadi panutan dalam melakukan pencegahan bencana menjadi tinggi (Nurwahono, dkk, 2015: 4). Mitigasi bencana melalui pendidikan formal diharapkan menjadi upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dikenalkan secara lebih dini kepada seluruh siswa, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap kesiapsiagaan individu maupun masyarakat terhadap bencana. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan penetapan kebijakan nasional di bidang pendidikan tentang penanggulangan bencana. Selain itu, diperlukan juga kerja sama seluruh elemen masyarakat dan sektor negara untuk meminimalisir hambatan, dan sebaliknya mendukung implementasi mitigasi bencana pada pendidikan formal.

Penyusunan kebijakan tentang penanggulangan bencana bisa

berkaca pada kebijakan negara lain yang rawan bencana semisal Jepang. Jepang merupakan negara yang unggul dalam upaya mitigasi bencana. Jepang memiliki manajemen tanggap bencana yang sangat efektif dan cepat dalam menangani korban bencana, mengurangi dampak, serta melakukan *recovery* pascabencana (Belajar Ekonomi, 13 Oktober 2018). Jepang telah menerapkan kebijakan kurikulum pelajaran bencana sejak anak-anak duduk di bangku taman kanak-kanak (TK) (Republika.co.id, 13 Oktober 2018). Siswa Jepang diajari pelatihan evakuasi bencana di kelas masing-masing. Sehingga, begitu gempa skala besar hingga 7 SR mengguncang, masyarakat segera membawa tas dan menuju ke *shelter* dengan kondisi tenang.

Beberapa upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan mitigasi bencana pada pendidikan formal, diantaranya: 1) pengintegrasian pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui pendidikan mitigasi ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Pemerintah bersama instansi terkait, diharapkan terus bekerja sama dalam mengimplementasikan kurikulum kebencanaan ke dalam semua jenjang pendidikan. Kurikulum kebencanaan disesuaikan dengan usia dan kapasitas anak dalam menghadapi keadaan darurat; 2) pemberdayaan peran kelembagaan, kemampuan komunitas sekolah, serta membangun kemitraan dan jaringan dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di sekolah; 3) pembekalan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah untuk meningkatkan pengetahuan

kebencanaan sebelum menyampaikan materi mitigasi bencana kepada siswa; dan 4) peningkatan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana.

Salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam mitigasi bencana adalah peta dasar untuk mitigasi bencana. Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus segera menyusun serta mendistribusikan peta dasar mitigasi bencana di sekolah-sekolah sebagai upaya penyediaan informasi darurat untuk meminimalisir risiko bencana. Selama ini data kerawanan tidak disajikan secara terbuka oleh pemerintah dengan pertimbangan investasi (*Kompas*, 12 Oktober 2018). Padahal, keterbukaan data kerawanan bencana dapat mengantisipasi kerugian yang jauh lebih banyak ketika terjadi bencana.

Pelaksanaan mitigasi bencana di sekolah meliputi kegiatan edukasi mengenai kebencanaan serta melakukan pelatihan simulasi mengenai jenis-jenis bencana, tanda-tanda akan terjadinya bencana, dampak bencana, upaya yang dilakukan pada prabencana, saat bencana dan pascabencana, upaya pengurangan risiko serta kerentanan dan kerawanan bencana di daerahnya yang dilaksanakan secara kontinyu. Di samping itu, disampaikan pula mengenai pendidikan untuk merawat dan mencintai lingkungan guna mencegah terjadinya bencana. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pada seluruh ranah pendidikan siswa, yakni ranah kognitif (pengetahuan), psikomotor (keterampilan), serta afektif (sikap) tanggap bencana yang ditujukan untuk mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana.

Pengetahuan mengenai kebencanaan dapat diukur melalui

indikator pengetahuan tentang jenis-jenis bencana, tanda-tanda akan terjadinya bencana, dampak bencana, upaya yang dilakukan prabencana, saat bencana dan pascabencana, serta pengetahuan tentang di mana tempat yang aman untuk mengungsi. Keterampilan tanggap bencana merupakan keterampilan yang ditunjukkan dalam penyelamatan diri sendiri maupun orang lain pada kondisi bencana, serta pemulihan pascabencana. Sementara sikap tanggap bencana merupakan sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi terjadinya suatu bencana yang dapat dinilai melalui indikator sikap antara lain; sadar akan bahaya, tenang menghadapi bencana, tolong-menolong, solidaritas dan gotong royong. (Ksanti dkk, 2015; 6). Melalui penguatan kapasitas pengetahuan, keterampilan, serta sikap tanggap bencana yang diperoleh dari mitigasi bencana, diharapkan risiko bencana yang dapat terjadi kapan saja bisa diminimalisir.

Penutup

Kerja sama pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk bersama-sama meminimalisir risiko bencana. Sektor pendidikan menjadi sektor penting yang berkontribusi dalam tindakan preventif dengan melaksanakan pendidikan penanggulangan bencana melalui mitigasi bencana. Sebab sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang dianggap efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

Dalam pelaksanaannya mitigasi bencana melalui sektor pendidikan formal masih mengalami berbagai hambatan baik dari sisi kurikulum, sumber daya maupun sarana dan prasarana penyelenggaraan. Perlu kerja sama berbagai pihak untuk dapat

menyukseskan penyelenggaraan secara berkelanjutan. DPR RI memiliki peran penting baik dalam hal legislasi maupun pengawasan terhadap penanggulangan bencana pada berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Dalam hal ini DPR RI, khususnya Komisi VII dan Komisi X, perlu menjembatani koordinasi berbagai lembaga terkait kebijakan penyelenggaraan mitigasi bencana melalui pendidikan formal serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan mitigasi bencana pada pendidikan formal dapat terselenggara secara berkesinambungan.

Referensi

- Belajar Ekonomi. "Mengenal Disaster Management, Melihat Cara Jepang Menangani Bencana Alam" <https://www.ajarekonomi.com/2016/05/mengenal-disaster-management-melihat.html>, diakses 13 Oktober 2018.
- International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). (2005). "Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana". *Konferensi Sedunia tentang Peredaman Bencana 18-22 Januari 2005*, Kobe, Hyogo, Japan.
- Ksanti, R.A., Suliyannah, & Subekti, H. (2015). "Melatih Sikap Tanggap Bencana Siswa Melalui Pembelajaran yang Mengintegrasikan Nilai Kearifan Lokal". *Jurnal Pendidikan IPA*. Vol. 03, No. 03, hlm. 1-8.
- Nurwahono, dkk. (2015). "Modul 3 Pilar 3 - Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana". Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbud.
- "Peta Dasar untuk Mitigasi Bencana", *Kompas*, 12 Oktober 2018, hlm. 14.

“Prioritaskan Pendidikan bencana”, *Kompas*, 13 Oktober 2018, hlm. 12.

Rahma, Aldila. (2018). “Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal”. *Jurnal Varia Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, hlm. 1-11.

“Rangkaian Gempa di Indonesia Tahun 2018”, *Kompas*, 12 Oktober 2018, hal. 15.

Republika.co.id. “Pendidikan Mitigasi Bencana yang Belum Masuk Kurikulum”. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/10/08/pga0ck430-pendidikan-mitigasi-bencana-yang-belum-masuk-kurikulum>, diakses 15 Oktober 2018.

Rizaldy, David. “Implementasi Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah-Sekolah di Indonesia Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Siswa Siap Siaga”, *Prosiding PIT Ke-5 Riset Kebencanaan IABI Universitas Andalas, Padang 2-4 Mei 2018*, hlm. 479-487.



Fieka Nurul Arifa
fieka.arifa@dpr.go.id
fiekanarifa@gmail.com

Fieka Nurul Arifa, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo pada tahun 2011 dan Pendidikan S2 Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.